

KETIDAKMERATAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI RT. 013 KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

Herlinawati ¹, Dra. Lisbet Situmorang, M. Si²

Abstrak

Penelitian ini membahas ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial di RT. 013 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Meskipun program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, kenyataannya masih ditemukan warga yang tidak memenuhi kriteria tetapi tetap menerima bantuan, sementara warga miskin justru tidak terdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan disebabkan oleh kesalahan dalam pendataan, lemahnya pengawasan, serta adanya kepentingan pribadi dalam proses distribusi. Minimnya transparansi dan partisipasi warga dalam verifikasi data juga memperburuk ketidakadilan dalam penyaluran. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, peningkatan pengawasan, serta keterbukaan dalam mekanisme distribusi agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara adil, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kata Kunci: *Bantuan Sosial, Ketidakmerataan, Kesejahteraan, PKH, BPNT, BLT*

Pendahuluan

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah lama digulirkan sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan melindungi warga dari risiko sosial. Secara nasional, jutaan keluarga telah menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Namun demikian, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awal, karena sering ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran maupun masalah teknis dalam pendistribusian bantuan.

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: herliinawt04@gmail.com

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka kemiskinan di Samarinda mencapai 4,6 persen atau sekitar 19.500 jiwa. Pemerintah Kota telah menjalankan berbagai skema bantuan sosial, baik berupa tunai, pangan, maupun program pemberdayaan. Akan tetapi, fenomena ketidakmerataan tetap terjadi, baik dalam bentuk warga yang tidak layak tetapi masih menerima bantuan, maupun warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata sebagai penerima.

Permasalahan tersebut juga tampak jelas di RT. 013 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Warga menilai proses penyaluran bantuan sosial di wilayah ini tidak sepenuhnya adil. Beberapa kasus menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki kedekatan dengan aparat setempat lebih mudah mendapatkan bantuan, sementara warga yang miskin secara ekonomi tidak tercatat dalam daftar penerima. Selain itu, data penerima bantuan yang digunakan masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama, bahkan ada yang belum diperbarui selama lima hingga sepuluh tahun. Akibatnya, muncul kesenjangan antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima bantuan.

Minimnya transparansi dalam proses seleksi penerima, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya partisipasi warga dalam verifikasi data memperburuk ketidakmerataan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, kecemburuan sosial, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal. Penelitian ini berfokus pada pengalaman warga RT. 013 Kelurahan Bukit Pinang, guna mengidentifikasi akar permasalahan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika distribusi bantuan sosial di masyarakat. Dengan memahami persoalan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar lebih adil, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Ketidakmerataan pada dasarnya menggambarkan kondisi ketika sumber daya, kesempatan, atau layanan publik tidak didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, ketidakmerataan terlihat ketika warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara ada penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh data penerima yang tidak valid, kelemahan dalam mekanisme distribusi, serta kurangnya transparansi dari pihak penyelenggara. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari adanya program bantuan sosial. Konsep kesejahteraan tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan material seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti rasa aman, keadilan, serta kebahagiaan hidup masyarakat. Suharto (2011) menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat yang baik akan terbentuk ketika hak-hak dasar warga terpenuhi secara adil. Oleh karena itu, bantuan sosial memiliki peran penting untuk menunjang kesejahteraan kelompok miskin dan rentan, meskipun keberhasilan pencapaiannya sangat bergantung pada sejauh mana distribusi dilakukan secara tepat sasaran.

Kebijakan bantuan sosial sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan ini dapat berbentuk uang, barang, maupun layanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi bentuk nyata dari kebijakan bantuan sosial yang berjalan hingga kini. Namun dalam praktiknya, berbagai masalah masih sering muncul, terutama terkait dengan validasi data, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan pengawasan di tingkat lokal. Akibatnya, masih banyak warga yang layak tetapi tidak menerima bantuan, sementara warga yang lebih mampu justru terdaftar sebagai penerima.

Dalam kaitannya dengan birokrasi, permasalahan penyaluran bantuan sosial sering kali dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi birokrasi merujuk pada penyimpangan atau kerusakan dalam sistem birokrasi yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Ma'ruf (2010) menjelaskan bahwa bentuk patologi birokrasi antara lain adalah penyalahgunaan wewenang, nepotisme, lemahnya pengawasan, dan kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan. Dalam praktik penyaluran bantuan sosial, hal ini tampak melalui kesalahan dalam pendataan, diskriminasi dalam menentukan penerima, hingga praktik kolusi antara aparat dengan warga tertentu. Situasi tersebut menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak adil dan pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosial di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam realitas sosial yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial di RT. 013 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif dari para informan yang terlibat langsung dalam permasalahan, sehingga hasil yang diperoleh lebih deskriptif dan kontekstual.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal utama, yaitu kesalahan dalam proses pendataan penerima bantuan, lemahnya pengawasan dari pihak terkait, serta adanya kepentingan pribadi dalam mekanisme distribusi. Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis data,

yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi bersama warga penerima maupun non penerima bantuan, Ketua RT, pihak kelurahan, serta Dinas Sosial Kota Samarinda. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, peraturan, serta literatur yang terkait dengan kebijakan bantuan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, observasi, yakni dengan mengamati secara langsung bagaimana proses penyaluran bantuan berlangsung di lapangan. Kedua, wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan utama (warga), informan kunci (Ketua RT), dan informan pendukung (pihak kelurahan dan Dinas Sosial) untuk mendapatkan informasi terkait pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka mengenai distribusi bantuan. Ketiga, dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data tambahan berupa catatan, daftar penerima, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan di lapangan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang dengan cara membandingkan data yang diperoleh untuk memastikan keabsahan temuan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

a) Hasil Penelitian

Tabel 1. Identitas informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	SA	57 th	Jualan di kantin
2.	MJ	59 th	IRT
3.	SF	47 th	IRT
4.	SQ	30 th	IRT

Secara umum, dari keempat informan penerima bantuan sosial ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar adalah perempuan dengan status ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini menguatkan fakta bahwa bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh kelompok rentan, terutama perempuan

tanpa pekerjaan, lansia, atau mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu.

b) Bansos yang tersalur

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada warga RT 013 Kelurahan Bukit Pinang, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketiga program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa uang tunai maupun pangan. Namun dalam praktiknya, penyaluran bantuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait keterjangkauan dan pemerataan penerima manfaat.

PKH di RT 013 diberikan kepada keluarga dengan komponen kesehatan dan pendidikan, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. Beberapa warga, seperti SQ, telah menerima bantuan PKH sejak anaknya masih kecil dan merasa sangat terbantu. Namun, terdapat juga warga lain seperti SH, seorang janda dengan dua anak sekolah, yang belum pernah terdaftar sebagai penerima meskipun kondisi ekonominya sulit. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan PKH belum sepenuhnya akurat dalam menjangkau keluarga miskin.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) umumnya diterima warga setiap bulan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat ditukar dengan bahan pangan pokok. SA, salah satu warga, rutin mendapatkan beras dan telur dari program ini. Meski begitu, masih ada warga lain seperti FN yang hidup dengan penghasilan tidak tetap dan tinggal di rumah kontrakan, tetapi belum pernah menerima bantuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa seleksi penerima BPNT masih belum merata di tingkat lokal.

Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan secara tunai dan cukup membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. SQ, misalnya, mengaku sangat terbantu ketika menerima BLT meskipun penyalurannya tidak selalu rutin. Namun, masih terdapat warga rentan seperti WN, seorang penyandang disabilitas, yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini menandakan adanya masalah dalam mekanisme pendataan dan distribusi BLT di lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun bansos telah tersalurkan kepada sebagian warga RT 013, masih terdapat ketimpangan dalam distribusinya. Banyak keluarga miskin yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar sebagai penerima, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya. Selain itu, minimnya informasi tentang prosedur pendaftaran turut menjadi penghambat, membuat warga yang membutuhkan tidak mengetahui bagaimana cara mengakses bantuan tersebut. Dengan demikian, perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi, serta sosialisasi program sangat diperlukan agar bansos benar-benar tepat sasaran.

c) Kesalahan Dalam Proses Perekrutan

Proses perekrutan penerima bantuan sosial di RT 013 Kelurahan Bukit Pinang seharusnya dimulai dari pendataan warga miskin oleh petugas, kemudian diverifikasi melalui DTKS dan Dinas Sosial. Namun, praktik di lapangan tidak berjalan ideal. Pendataan sering dilakukan secara tertutup oleh kelurahan atau pendata tanpa melibatkan RT dan musyawarah warga. Akibatnya, banyak data penerima tidak sesuai dengan kondisi *real* ada warga miskin yang tidak terdaftar, sementara yang lebih mampu justru menerima bantuan.

Ketua RT 013 mengakui bahwa pihak RT jarang dilibatkan sejak awal dan baru mengetahui daftar penerima setelah bantuan turun. Warga pun bingung karena tidak tahu prosedur mendaftar, seperti dialami FN dan WN yang merasa layak tetapi tidak pernah menerima bantuan. Sementara itu, penerima seperti SQ menyebut bahwa proses seleksi tidak transparan dan penerima dipilih tanpa penjelasan yang jelas.

Masalah ini juga diperparah oleh ketiadaan pedoman atau pelatihan resmi bagi petugas kelurahan dan RT, sehingga seleksi masih mengandalkan data lama yang tidak diperbarui. Pihak kelurahan menyebut hanya mengusulkan, sementara verifikasi dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Dinas Sosial Kota Samarinda menegaskan bahwa data penerima berasal dari BPS berdasarkan desil 1 dan 2, dengan kuota terbatas, sehingga banyak warga miskin tidak terakomodasi. Selain itu, perubahan kondisi warga, seperti pindah, meninggal, atau perubahan ekonomi, sering tidak tercatat secara cepat dalam sistem.

d) Pengawasan Yang Lemah

Pengawasan dalam program bantuan sosial di RT 013 Kelurahan Bukit Pinang masih sangat lemah dan belum berjalan optimal. Mekanisme kontrol maupun evaluasi penerima tidak dilakukan secara rutin dan terbuka, sehingga banyak data penerima tidak diperbarui. Hal ini terlihat dari masih tercatatnya warga yang sudah meninggal atau kondisinya membaik sebagai penerima, sementara warga miskin yang layak justru terlewat.

Ketua RT mengungkapkan bahwa pendataan sering kali hanya formalitas tanpa tindak lanjut, dan keluhan warga jarang ditindaklanjuti secara serius. Verifikasi dari pihak kelurahan maupun Dinas Sosial juga bersifat selektif, hanya dilakukan jika ada laporan tambahan. Bahkan, kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mencoret penerima yang tidak layak, sementara Dinas Sosial lebih banyak mengandalkan data administratif dari DTKS tanpa verifikasi lapangan secara berkala. Kondisi ini menyebabkan pengawasan distribusi bansos menjadi tidak efektif, dengan data yang tidak akurat dan distribusi yang berpotensi tidak tepat sasaran.

e) Adanya Kepentingan Pribadi

Dalam praktik penyaluran bantuan sosial di RT 013 Kelurahan Bukit Pinang, ditemukan adanya pengaruh faktor non-ekonomi, seperti kedekatan

dengan aparat, status sosial, maupun hubungan keluarga. Beberapa warga miskin seperti WN dan SH mengaku tidak pernah menerima bantuan, sementara penerima justru berasal dari keluarga yang relatif lebih mampu namun memiliki hubungan dekat dengan pengurus lingkungan. Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa distribusi tidak sepenuhnya objektif, melainkan dipengaruhi kepentingan pribadi dan jaringan sosial tertentu.

Selain itu, informasi mengenai bantuan tidak disosialisasikan secara terbuka. Warga yang aktif di kegiatan sosial atau dekat dengan pengurus lebih dulu mengetahui adanya bantuan, sementara warga lain sering kali tertinggal informasi. Ketua RT juga mengakui melibatkan orang-orang kepercayaan dalam pendataan, yang meski bertujuan efisiensi, tetap membuka peluang konflik kepentingan.

Kurangnya transparansi, terbatasnya kuota, serta lemahnya pengawasan membuat distribusi bansos rentan terhadap praktik kolusi dan nepotisme. Akibatnya, banyak warga miskin yang sebenarnya layak justru tidak terakomodasi, sedangkan akses bantuan lebih sering dinikmati oleh kelompok yang memiliki kedekatan dengan pihak penyalur.

Pembahasan

a) Ketimpangan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang cukup signifikan dalam proses penyaluran bantuan sosial di RT 013, Kelurahan Bukit Pinang. Warga yang secara ekonomi sangat membutuhkan bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima, sementara individu yang secara kasat mata sudah tidak tergolong miskin masih tercantum sebagai penerima bantuan. Ketimpangan ini bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa ketidakadilan dan kekecewaan di kalangan warga. Masyarakat merasa bahwa program bantuan sosial belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh, dan justru menambah kesenjangan sosial antarwarga.

Dalam beberapa kasus, ditemukan nama-nama penerima bantuan yang sudah pindah domisili atau bahkan telah meninggal dunia namun masih tetap menerima bantuan. Sementara itu, warga miskin yang menghadapi kesulitan ekonomi setiap hari tidak pernah tersentuh oleh program bantuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keakuratan sistem pendataan dan proses seleksi penerima. Warga mengeluhkan kurangnya transparansi dan tidak adanya penjelasan resmi dari pihak yang berwenang, seperti RT atau kelurahan. Ketika ketidakjelasan ini berlangsung lama, muncul spekulasi bahwa distribusi bantuan lebih didasarkan pada hubungan sosial daripada kebutuhan riil.

Ketimpangan ini menunjukkan kegagalan negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi inti dari program bantuan. Konsep ketidakmerataan sebagaimana dijelaskan oleh Rahmansyah et al. (2020) sangat relevan dalam konteks ini, di mana distribusi sumber daya tidak seimbang dan memperbesar jurang antara kelompok masyarakat miskin dan yang relatif lebih mampu. Ketika akses terhadap bantuan sosial tidak diberikan

kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, maka bantuan tidak hanya kehilangan efektivitasnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem.

Fenomena ketimpangan ini juga mengindikasikan adanya persoalan dalam mekanisme kebijakan sosial, yang semestinya berfungsi untuk melindungi kelompok rentan. Jika tidak segera dibenahi, maka ketimpangan tersebut bisa menjadi kronis dan memperburuk kemiskinan struktural yang ada di masyarakat.

b) Hambatan Struktural dan Administratif

Penyaluran bantuan sosial di RT 013 tidak hanya bermasalah pada aspek penerima, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan struktural dan administratif yang cukup serius. Hambatan ini berkaitan dengan mekanisme pendataan, pembaruan informasi, serta pembagian kewenangan antar level birokrasi yang tidak jelas dan tidak berjalan efektif.

Salah satu masalah paling mendasar adalah penggunaan data lama, bahkan ada yang menyebut berasal dari lima hingga sepuluh tahun yang lalu. Data ini dijadikan acuan dalam penentuan penerima bantuan oleh pemerintah, tanpa adanya verifikasi ulang atau evaluasi kondisi terbaru di lapangan. Akibatnya, muncul ketimpangan antara data dan realitas sosial. Banyak warga miskin yang hidup dalam kondisi sulit tidak tercatat sebagai penerima bantuan, sementara ada nama-nama penerima yang sudah pindah domisili, tidak lagi layak, atau bahkan telah meninggal dunia namun masih tercatat aktif.

Ketua RT mengakui bahwa mereka tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pendataan dan pembaruan data. Pendataan dilakukan oleh petugas yang dikirim dari kelurahan atau dinas terkait, tanpa koordinasi langsung dengan tokoh lingkungan yang lebih memahami kondisi warga secara nyata. Warga pun tidak diberi ruang untuk memberikan masukan atau melakukan pengecekan terhadap daftar yang sudah disusun. Ini mencerminkan adanya sistem birokrasi yang tertutup dan top-down.

Situasi ini sejalan dengan konsep patologi birokrasi, khususnya dalam bentuk kesalahan dalam proses perekrutan dan lemahnya sistem informasi, seperti yang dijelaskan oleh Mu'min Ma'ruf (2021) dan Siagian (1994). Patologi semacam ini muncul ketika sistem birokrasi kehilangan akuntabilitas, tidak mampu menyerap kondisi sosial masyarakat secara langsung, dan hanya mengandalkan data administratif yang tidak responsif terhadap perubahan sosial.

Selain itu, tumpang tindih wewenang antar lembaga membuat proses verifikasi dan penghapusan data bermasalah menjadi sangat lambat. Kelurahan tidak berwenang mencoret nama penerima bantuan, dan Dinas Sosial hanya menerima usulan tanpa proses evaluasi secara langsung. Pengawasan internal pun lemah, sehingga data bermasalah terus bergulir tanpa koreksi. Akibatnya, program bantuan sosial kehilangan arah dan tidak mencapai sasaran utama, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin.

c) Akses Informasi dan Literasi Sosial Warga

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah minimnya akses informasi yang dimiliki oleh warga miskin terkait program bantuan sosial. Banyak warga tidak mengetahui adanya program bantuan, tidak memahami alur pendaftaran, serta tidak tahu siapa yang berwenang untuk dihubungi jika ingin mengajukan bantuan. Informasi hanya beredar secara terbatas di kalangan tertentu, khususnya mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pengurus lingkungan atau aktif secara sosial. Akibatnya, warga yang tidak memiliki koneksi sosial atau yang pasif dalam kegiatan masyarakat cenderung tertinggal dan tidak masuk dalam daftar penerima, meskipun mereka sangat membutuhkan bantuan secara ekonomi.

Kondisi ini sejalan dengan konsep ketidakmerataan akses informasi, seperti dijelaskan oleh Rahmansyah et al. (2020), bahwa ketidakmerataan dalam bantuan sosial tidak hanya terjadi pada aspek data dan distribusi geografis, tetapi juga pada penyebaran informasi. Ketika informasi tidak disampaikan secara merata, maka akan terjadi ketidakadilan dalam penerimaan manfaat. Hal ini diperparah dengan administrasi yang tidak transparan, sebagaimana dijelaskan oleh Gemiharto dan Rosfiantika (2017), di mana masyarakat tidak diberikan akses untuk mengetahui atau mengevaluasi siapa saja yang menerima bantuan dan mengapa.

Lebih jauh lagi, situasi ini mencerminkan rendahnya literasi sosial masyarakat dalam mengakses kebijakan publik. Literasi sosial, dalam konteks ini, merujuk pada kemampuan warga dalam memahami prosedur bantuan, berpartisipasi dalam proses, dan memperjuangkan hak-hak sosialnya. Ketika literasi sosial rendah, warga menjadi pasif, bergantung pada informasi dari mulut ke mulut, dan tidak mampu mengakses haknya secara mandiri. Namun, rendahnya literasi ini bukan hanya tanggung jawab warga, melainkan juga menunjuk pada gagalnya sistem birokrasi dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif.

Dalam sistem pelayanan publik yang ideal, transparansi dan partisipasi warga menjadi prinsip dasar. Ketika dua hal ini tidak terpenuhi, kebijakan menjadi eksklusif dan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Dalam konteks RT 013, ketimpangan akses informasi menjadi penyebab utama dari ketimpangan penerimaan bantuan sosial, dan hal ini menunjukkan bahwa sistem belum berhasil mewujudkan keadilan sosial sebagaimana mestinya.

d) Pengaruh Hubungan Sosial terhadap Akses Bantuan

Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh signifikan dari hubungan sosial dalam menentukan siapa yang mendapatkan bantuan sosial. Warga yang memiliki kedekatan dengan Ketua RT, kader dasawisma, atau pihak kelurahan cenderung lebih mudah masuk dalam daftar penerima. Bahkan, dalam beberapa kasus, warga yang secara ekonomi lebih mampu bisa menerima bantuan hanya karena memiliki hubungan dekat dengan pihak pengusul.

Sementara itu, warga miskin yang tidak aktif dalam lingkungan atau tidak memiliki koneksi sosial dengan aparat kerap kali luput dari perhatian. Mereka

tidak mendapatkan informasi, tidak diajak musyawarah, dan akhirnya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana hubungan sosial dapat memengaruhi alokasi sumber daya publik secara tidak adil.

Fenomena ini menunjukkan adanya bentuk diskriminasi sosial lokal, yaitu situasi ketika distribusi kebijakan tidak berdasarkan kebutuhan objektif, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan personal. Konsep ini diperkuat oleh Gemiharto dan Rosfiantika (2017) yang menyatakan bahwa bias dalam jaringan sosial lokal dapat mengganggu keadilan kebijakan.

Di sisi lain, praktik ini juga termasuk dalam bentuk patologi birokrasi, yaitu ketika pejabat atau pengurus lingkungan menggunakan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Hasim (2023) menyebutnya sebagai penyimpangan birokrasi yang terjadi ketika keputusan publik didasarkan pada hubungan personal, bukan prinsip objektivitas dan akuntabilitas.

Dampaknya sangat serius, tidak hanya memunculkan ketimpangan penerimaan bantuan, tetapi juga menyebabkan konflik sosial di lingkungan masyarakat. Beberapa warga mengaku merasa iri, kecewa, dan bahkan kehilangan kepercayaan terhadap aparat lingkungan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kredibilitas kebijakan sosial akan runtuh dan bantuan tidak akan pernah menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penyaluran bantuan sosial di RT. 013 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu masih belum berjalan secara merata dan adil. Banyak warga miskin dan rentan yang tidak tercatat sebagai penerima, sementara terdapat warga yang relatif lebih mampu justru tetap menerima bantuan. Ketidakmerataan tersebut terutama dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kesalahan dalam pendataan yang belum diperbarui secara berkala, lemahnya pengawasan dari pihak terkait, serta adanya kepentingan pribadi atau nepotisme yang memengaruhi proses distribusi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan bantuan sosial yang dirancang pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran ketika diimplementasikan di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial. Pertama, pemerintah perlu melakukan pembaruan data penerima secara berkala dengan melibatkan RT, kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat agar daftar penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kedua, pengawasan harus ditingkatkan tidak hanya oleh aparat kelurahan, tetapi juga melalui mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan warga memberikan masukan atau keberatan. Ketiga, perlu adanya transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan, misalnya dengan mengumumkan daftar penerima secara terbuka agar dapat diuji bersama oleh masyarakat. Keempat, aparat pelaksana di tingkat RT dan kelurahan perlu menjunjung tinggi netralitas serta menghindari praktik nepotisme yang merugikan warga miskin.

Dengan langkah-langkah tersebut, penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat lebih adil, tepat sasaran, dan benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Samarinda.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Wiyono, B. (2021). *Ketidakmerataan distribusi bantuan sosial di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 45–56.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Program Bantuan Sosial*. Jakarta: BPK RI.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Fuaddah, N., & Fridayne, R. (2023). Literasi digital masyarakat sebagai respons persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran: Studi kasus di Kelurahan Nanggawer, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Politik*, 9(2), 112–124.
- Gemiharto, A., & Rosfiantika, R. (2017). Faktor penyebab ketidakmerataan bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 77–88.
- Hasim, H. (2023). Patologi birokrasi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 55–68.
- Ma'ruf, M. (2010). *Patologi Birokrasi: Penyakit dan Penyimpangan dalam Sistem Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Rahmansyah, R., Suryana, A., & Lestari, D. (2020). Ketidakmerataan akses layanan sosial di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 89–102.
- Ramadhani, R., & Megawati, S. (2021). Ketidakmerataan bantuan pemerintah kepada masyarakat selama pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 56–68.
- Sobari, S., & Zuama, D. (2023). Program bantuan sosial dan tantangan validasi data di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 10(2), 34–49.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Yunita, R., & Agustang, A. (2022). Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi Covid-19 pada masyarakat kurang mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(3), 210–222.
-
-

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Ketidakmerataan Penyaluran Bantuan Sosial Di RT 013 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Pengarang : Herlinawati

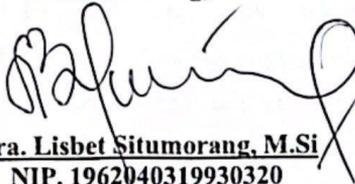
NIM : 2102036070

Program Studi : Pembangunan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Pembangunan Sosial Fisip Unmul.

Samarinda,
Pembimbing,



Dra. Lisbet Situmorang, M.Si
NIP. 1962040319930320

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal	Program Studi	
Volume :		[ttd & stempel]
Nomor :		
Tahun :		
Halaman :		[Nama]